



RABU, 09 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Panitia RSMY Jangan Mengada-ada

Bengkulu – Indikasi kecurangan dalam tender pembangunan proyek gedung medical centre di RSMY senilai Rp 65 miliar dikomentari oleh pakar hukum Tata Negara Prof. Dr. Juanda, SH, MH. Menurut dia, penambahan persyaratan yang dilakukan oleh panitia kepada peserta lelang harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Bila dalam aturan yang berlaku tidak ada penambahan persyaratan, maka panitia tidak seharusnya menambah-nambahkan persyaratan lainnya, apalagi persyaratan itu dicantumkan tertulis.

Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Panitia itu harus membuktikan dimana aturan dan ketentuannya, buka pasalnya. Di peraturan mana itu ada (penambahan syarat). Kalau aturannya tidak ada, ya jangan mengada-ada,” ujar Juanda.

Sebagaimana dilansir sebelumnya bahwa PPTK dalam proyek/kegiatan tersebut, Arsuan Sono telah mengakui bahwa memang ada penambahan persyaratan yakni perusahaan yang ikut lelang harus mempunyai pengalaman mengerjakan proyek gedung perumhaskitan dengan nilai Rp 100 miliar atau lebih. Ini memberatkan sebagian perusahaan yang ingin ikut lelang.

Menurut Juanda, kalau sudah ada pengakuan bahwa persyaratan itu memang sengaja ditambahkan tanpa mempedomani aturan yang berlaku, maka perusahaan bisa menggugat. “Makanya perlu orang hukum dari perusahaan itu, protes saja. Kalau memang syarat itu tidak ada dalam aturan, itu berarti mengada-ada dan bisa saja ini untuk direkayasa,” kata Juanda.

Penambahan persyaratan itu sebenarnya sah-sah saja namun tidak harus dimasukkan dalam persyaratan tertulis. “Mungkin maksud panitia menginginkan perusahaan yang benar-benar berpengalaman. Tapi seharusnya tidak perlu dicantumkan sebagai persyaratan tertulis. Nanti kan panitia juga yang akan menilai dan menentukan. Tidak perlu dicantumkan dalam salah satu persyaratan,” ujarnya.

Kalau dimasukkan dalam persyara-

tan tertulis, memang akan membuat peserta lainnya merasa keberatan, terutama perusahaan yang belum pernah mengerjakan proyek perumahan dengan nilai Rp 100 miliar, walau pun sebenarnya semua perusahaan rata-rata sudah berpengalaman.

“Kalau tidak ada ketentuan yang tegas dan jelas terkait persyaratan itu nanti proses lelang ini bisa digugat orang. Saya hanya mengimbau ikuti saja bagaimana aturannya. Tapi kalau aturannya tidak ada jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi-kurangi demi untuk memenangkan satu perusahaan. Jangan sampai ada dugaan bahwa proyek ini sudah dikondisikan atau sudah diketahui siapa pemenangnya,” kata Juanda.

Kemudian ia juga mengimbau kepada panitia agar tidak bermain-main dengan lelang proyek yang besar ini. “Nanti pasti bakal ketahuan juga kalau ada permainan. Panitia itu tidak usah main proyek atau main rekayasa. Nanti ketahuan, bermasalah, akibatnya fatal. Oleh karena itu ikuti saja aturan yang ada. Kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Berikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi, baik itu perusahaan dari Jakarta, Provinsi Bengkulu maupun dari daerah, biarkan mereka bersaing secara sehat,” jelas Juanda.

Menurut Juanda, wajar saja kalau ada perusahaan/kontraktor yang merasa curiga ada aroma kecurangan apabila panitia menambahkan persyaratan yang seperti itu, yakni harus punya pengalaman mengerjakan proyek senilai Rp 100 miliar. “Wajar saja mereka curiga kalau memang persyaratan itu ditambah. Tapi persoalan wajar atau tidak wajar ini kembali pada penilaian publik,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Pro-

vinisi Bengkulu Hj.Yuliswani, SE yakin bahwa proses lelang proyek tersebut bersih tanpa rekayasa atau pun permainan. Karena dalam pelaksanaan lelang baik PPTK maupun para pokja itu dibantu dan didampingi oleh manajemen konstruksi.

“Saat ini prosesnya itu kan sedang berlangsung. Jangan kita mengganggu proses itu. Kalau diganggu seperti ini, mereka akan merasa tidak tenang dalam melaksanakan pekerjaan. Yang penting, mereka pasti akan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan aturan,” kata Yuliswani.

Soal penambahan persyaratan yang diduga mengada-ada itu, kata Yuliswani masih akan dievaluasi kembali antara panitia pokja dan tim manajemen konstruksi. “Yang penting kita berikan kepercayaan bahwa mereka akan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan aturan.

“Soal penambahan persyaratan, kan akan ada evaluasinya. Kita percayakan saja bahwa panitia pokja itu akan melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Nanti pokja itu akan melihat lagi aturan dan akan dikomunikasikannya ke OPD teknis. Ini kan baru proses awal, dilihat dulu sama pokja,” tukasnya.

Apakah diperbolehkan menambah persyaratan seperti itu? Yuliswani belum bisa menjawab. “Itu bukan kapasitas saya, yang jelas nanti didiskusikan oleh pendamping manajemen konstruksi. *Apapun itu akan sesuai dengan aturan.* Biarkan mereka bekerja, percayakan bahwa mereka akan melaksanakan proses sesuai aturan. Saya pastikan ini bersih, saya optimis dan yakin. Saya yakin mereka tidak akan berani mengambil resiko kalau melanggar aturan. Pasti mereka akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan aturan,” tutup Yuliswani. (tew)